

 JAYA CM	DATA UMUM	TANGGAL	26-Jun-23
DIVISI MARKETING	TRANSPORTASI	HALAMAN	1 / 1

	NAMA PROYEK	:	Konsultan Manajemen Proyek (KMP) Jalan Tol BBPJJN DKI Jakarta - Jawa Barat
	PEMILIK	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) DKI Jakarta Jawa Barat
	JENIS PROYEK	:	Jalan Tol
	LOKASI	:	berpusat di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Wilayah kerja pada ruas Jalan Tol Konstruksi dan Ruas Jalan Tol Operasi di Wilayah BBPJJN DKI Jakarta – Jawa Barat - Jakarta Selatan (Kota)
	PERIODE	:	5 bulan kalender sejak SPMK

1	Panjang Track:	
	- Fase 1	Km
	- Fase 2	Km
	Total	Km
2	Lingkup Pekerjaan	Pengawasan
		A. Membantu tugas dan meningkatkan kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat dalam penyelesaian masalah teknis
		B. Membantu pembinaan teknik dan administrasi proyek dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan tol hingga pelaksanaan koordinasi dan pemantauan kegiatan operasi
		C. Pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, sehingga memenuhi standar mutu dan waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam PPJT
3	Biaya Konstruksi	TBA
	PAGU	Rp 4.406.879.000 incl PPN % ; KSO - Jaya CM %
4	Konsultan	PT Jaya CM (Leader)
		PT Marga Graha Penta (MGP)
5	Kontraktor	TBA

Pengumuman

[Peserta](#)

Kode Tender	85692064		
Nama Tender	Konsultan Manajemen Proyek (KMP) Jalan Tol BBPJN DKI Jakarta - Jawa Barat		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	43530950	Konsultan Manajemen Proyek (KMP) Jalan Tol BBPJN DKI Jakarta - Jawa Barat	APBN
Uraian Singkat Pekerjaan	📄 Uraian Kerja KMP Jalan Tol BBPJN DKI Jakarta Jawa Barat.pdf		
Tanggal Pembuatan	15 Juni 2023		
Tahap Tender Saat Ini	Pengumuman Prakualifikasi [...]		
K/L/PD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Satuan Kerja	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat		
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi		
Metode Pengadaan	Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya		
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction		
Tahun Anggaran	APBN 2023		
Nilai Pagu Paket	Rp. 4.406.879.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 4.406.879.000,00
Jenis Kontrak	Waktu Penugasan		
Lokasi Pekerjaan	■ Wilayah kerja pada ruas Jalan Tol Konstruksi dan ruas Jalan Tol Operasi di Wilayah BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat - Jakarta Selatan (Kota)		
Bobot Teknis	80.0		
Bobot Biaya	20.0		

Syarat Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas	
	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.	
	Perizinan Berusaha	Bidang Jasa Konstruksi
	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.	
	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk.	
	Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.	
	Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi: 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain; 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	
	Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.	
	Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan: 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil; 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil; 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi; 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil; 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau 6) Koperasi dengan Koperasi.	
	Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi: 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.	
	Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.	
	Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi: 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.	
	Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan: 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU; 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.	
	Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU: 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.	
	Persyaratan Kualifikasi Lain Persyaratan Kualifikasi Lainnya yang Dipersyaratkan	
	Persyaratan Kualifikasi Teknis	
	a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.	
	b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.	
	memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.	
	Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	
	Syarat Kualifikasi Teknis Lain Persyaratan Kualifikasi Lainnya yang Dipersyaratkan	
Peserta Tender	31 peserta	

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Prakuifikasi	19 Juni 2023 16:30	27 Juni 2023 08:00	Tidak Ada
2	Download Dokumen Kualifikasi	19 Juni 2023 16:30	27 Juni 2023 16:30	1 kali perubahan
3	Penjelasan Dokumen Prakuifikasi	23 Juni 2023 10:00	23 Juni 2023 13:00	Tidak Ada
4	Kirim Persyaratan Kualifikasi	23 Juni 2023 13:00	27 Juni 2023 16:30	1 kali perubahan
5	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	28 Juni 2023 08:01	6 Juli 2023 16:30	Tidak Ada
6	Pembuktian Kualifikasi	3 Juli 2023 14:00	6 Juli 2023 16:30	Tidak Ada
7	Penetapan Hasil Kualifikasi	7 Juli 2023 10:00	7 Juli 2023 14:00	Tidak Ada
8	Pengumuman Hasil Prakuifikasi	7 Juli 2023 14:01	7 Juli 2023 23:30	Tidak Ada
9	Masa Sanggah Prakuifikasi	8 Juli 2023 08:00	13 Juli 2023 08:00	Tidak Ada
10	Download Dokumen Pemilihan	13 Juli 2023 09:00	21 Juli 2023 16:25	Tidak Ada
11	Pemberian Penjelasan	17 Juli 2023 09:30	17 Juli 2023 12:00	Tidak Ada
12	Upload Dokumen Penawaran	17 Juli 2023 12:01	21 Juli 2023 16:25	Tidak Ada
13	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	21 Juli 2023 16:30	31 Juli 2023 15:00	Tidak Ada
14	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	31 Juli 2023 15:01	31 Juli 2023 16:30	Tidak Ada
15	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	1 Agustus 2023 08:30	2 Agustus 2023 12:00	Tidak Ada
16	Penetapan Pemenang	2 Agustus 2023 12:00	2 Agustus 2023 16:00	Tidak Ada
17	Pengumuman Pemenang	3 Agustus 2023 08:30	3 Agustus 2023 12:30	Tidak Ada
18	Masa Sanggah	3 Agustus 2023 12:30	8 Agustus 2023 12:30	Tidak Ada
19	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	8 Agustus 2023 16:30	10 Agustus 2023 16:30	Tidak Ada
20	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	11 Agustus 2023 08:30	11 Agustus 2023 15:30	Tidak Ada
21	Penandatanganan Kontrak	14 Agustus 2023 08:30	14 Agustus 2023 15:30	Tidak Ada

URAIAN KERJA
KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK (KMP) JALAN TOL
BBPJN DKI JAKARTA – JAWA BARAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Jalan Tol, penyelenggaraan jalan tol tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan.

Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan. Direktorat Jenderal Bina Marga (Ditjen Bina Marha) mempunyai tugas dan wewenang dalam pembinaan penyelenggaraan jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 20 Tahun 2020, tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Nasional Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol, diperlukan penyesuaian tata Kelola Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu (PMPM) konstruksi jalan tol dengan Konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI) yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

Berdasarkan Permen PUPR tersebut tugas dan wewenang Ditjen Bina Marga, mencakup monitoring aspek teknis pelaksanaan konstruksi dan pengawasan aspek *quality assurance* pada pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJJN).

Disamping itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, koordinasi dan pemantauan kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol juga menjadi bagian dari tugas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJJN).

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat tersebut diperlukan kerjasama dengan penyedia jasa konsultan untuk dapat membantu dalam menangani seluruh beban tugas yang harus diselesaikan terkait masalah teknis yang bersifat spesifik dan memerlukan keahlian khusus guna meningkatkan kinerja pelayanan BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat.

Tujuan Layanan jasa ini adalah menuju penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan tol yang lebih terarah, efektif dan efisien serta pelaksanaan koordinasi dan pemantauan kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol yang lebih terkendali sesuai dengan kaidah-kaidah yang dipersyaratkan, khususnya agar pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat bisa memberikan hasil yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan organisasi dan institusi.

Penyedia Jasa yang dibutuhkan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar serta memiliki subklasifikasi Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (KL404) KBLI 2017 atau Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003) KBLI 2020.